



Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Implementation of The Healthy Indonesian Card Program in Lubuk Saban Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency

Hairida Wati, Indra Muda & Irwan Nasution

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Abstrak

Kartu Indonesia Sehat adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis agar mempermudah masyarakat kurang mampu dalam pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai beserta faktor-faktor penghambatnya. Teori yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi dan struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai belum efektif dan belum tepat sasaran. Hambatan yang di hadapi dalam program Kartu Indonesia Sehat yaitu tidak lengkapnya data-data di bidang obat-obatan di puskesmas bagi penerima Kartu Indonesia Sehat. Hal ini tidak maksimalnya komunikasi aparat Desa kepada masyarakat pada saat menjelaskan adanya program KIS dikarenakan pada saat mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan hanya dua kali dalam sebulan. Dan dengan adanya faktor penghambat tersebut masih belum mampu untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat yang kurang mampu terbantu karena tidak memikirkan biaya untuk pengeluaran biaya dalam pengobatan karena sudah terdaftar dalam program KIS yang sudah di sosialisasikan oleh pihak Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Indonesia Sehat

Abstract

The Healthy Indonesian card is a card that has a function to provide health insurance to the underprivileged with the aim of getting free health services in order to make it easier for the underprivileged in treatment. The purpose of this study was to determine the implementation of the Healthy Indonesia Card program in Lubuk Saban Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency and its inhibiting factors. The theory used is communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative method by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Healthy Indonesia Card Program in Lubuk Saban Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency has not been effective and has not been on target. The obstacle faced in the Healthy Indonesia Card program was the incomplete data on medicines in the health centers for recipients of the Healthy Indonesia Card. This is not optimal for village officials to communicate with the community when explaining the existence of the KIS program because at the time of gathering the community to socialize only twice a month. And with these inhibiting factors still unable to utilize the potential of natural resources, this study can be concluded that the economy of the underprivileged is helped because they do not think about the costs for medical expenses because they have been registered in the KIS program which has been socialized by the village.

Keywords: Impelemntation, Indonesian Healty Card

How to Cite: Wati, H. Muda, I. & Nasution, I. Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(1) 2023: 32-37,

PENDAHULUAN

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Pelaksananya dapat dilakukan di setiap fasilitas kesehatan tingkat utama dan tingkat lanjut. Kartu ini merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS kesehatan (Safi'i dkk, 2019; Br Simbolon dkk, 2019).

Dasar hukum pemerintahan KIS, adalah UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut diterbitkannya KIS merupakan perluasan dari masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Purba dkk, 2013; Pinem, 2016).

KIS yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, pertama kelompok masyarakat yang menjadi mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri) ataupun kontribusi bersama member kerjanya (sigmen atau pekerja). Kedua kelompok masyarakat makin tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (sigmen penerima bantuan iuran atau PBI) (Triyanto dkk, 2021; Putri dkk, 2019).

Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin keberadaan bantuan kesehatan berupa program KIS dan JKN belum begitu dikenal dan belum begitu dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tergolong miskin tidak memperoleh KIS tersebut. Berdasarkan data yang tercatat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2017 jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 2485 jiwa, yang terdiri atas 1148 jiwa laki-laki, 1337 perempuan dan 510 jumlah kepala keluarga laki-laki dan 170 kepala keluarga perempuan dan yang pesetra KIS berjumlah 225 jiwa. (Herlina dkk, 2020; Sianturi dkk, 2021).

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Program KIS di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Program KIS di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Program KIS di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program KIS di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkret, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan. Kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan saran-saran telah ditetapkan, program kegiatan di susun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai tujuan bersama (Suparman dkk, 2018; Munawaroh dkk, 2019).

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu untuk kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua bagian. Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis karena banyak proses.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bugin (2007), penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realita dari masalah yang akan dideskripsikan oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang ada. Bentuk penelitian ini adalah tentang penelitian deskriptif kualitatif. Jelasnya bentuk penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data terkait dengan peristiwa Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam mengambil data atau informasi. Dalam penelitian kualitatif diperlukan nya metode wawancara yang mendalam. Dengan wawancara yang mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau mencatat hasil yang dilakukan oleh informan.

Menurut Bugin (2007) Informan kunci adalah (mereka yang mengetahui dan memiliki sebagai informasi pokok) dalam metode kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu terdiri dari informan kunci, dan informan utama dan imforman tambahan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan daam penelitian ini yaitu

Observasi menurut (Sugiyono, 2016) Teknik pengumpulan dapat digunakan melakukan penggunaan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala- gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Menurut (Sugiyono 2016) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman, yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relavan dengan objek penelitian. Menurut (Sugiyono 2006) Wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam satu situasi yang saling berhadapan. Melakukan wawancara yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang beerputar disekitar pendapat dan keyakinan. Sebelum ke lapangan penulis terebih dahulu menyusun pedoman wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interkatif dari Milles dan Huberman (2010) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Teknik analisis data dalam suatu penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

Menurut Milles dan Huberman (2010) Reduksi Data sebagai suatu proses penelitian, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berjalan.

Menurut Milles dan Huberman (2010) Penyajian data yaitu sejumlah data atau informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan secara lanjut. Penyajian data ini berupa bagan, matriks, jaringan maupun berupa negatif. Penelitian ini menyajikan data mengenai program KIS. Menurut Milles dan Huberman (2010) dapat di artikan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang sangat penting, jangan salah peneliti salah menyimpulkan ataupun menafsirkan data, jika permasalahan diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut dilapangan terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program KIS yaitu program terkhususnya untuk masyarakat kurang mampu atau fakir miskin melalui. Dalam upaya ini agar masyarakat kurang mampu mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik di puskesmas maupun di Rumah Sakit. Adapun tujuan dari program ini yaitu

untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas kesehatan terkhususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menyerahkan bantuan ini kepada masyarakat miskin disetiap lingkungan, yang mana Kepala Desa bertanggung jawab untuk mendata masyarakat-masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu penulis meneliti ke masyarakat penerima bantuan ini ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penjelasan pemerintah Desa mengenai pemberian bantuan ini. Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan Program KIS di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tidak tepat sasaran dan tidak berlaku adil pada masyarakat-masyarakat kurang mampu.

Pelaksana program Kartu Indonesia Sehat dibentuk pada setiap Kecamatan yang terdapat peserta KIS. Pelaksana KIS terdiri dari pendamping sosial KIS dan asisten pendamping Desa. Pelaksana KIS merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam melaksanakan program KIS agar program KIS berjalan dengan baik dan lancar. Wilayah kerja pendamping KIS meliputi seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kerja di setiap kecamatan. Pendamping KIS lebih dari satu orang maka satu pendamping wajib ditunjuk sebagai Koordinator pendamping tingkat Kecamatan.

Untuk menentukan Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat, dalam penelitian ini, menggunakan empat dimensi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi (sosialisasi) adalah suatu bentuk informasi yang harus disampaikan kepada orang-orang agar mengetahui informasi apa yang ingin di mensosialisasikan tentang adanya program Kartu Indonesia Sehat.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui observasi, peneliti melihat bahwa berkaitan dengan penyampaian adanya program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masyarakat belum memahami dengan jelas seperti apa perkembangan KIS. Pemerintah Desa hanya menyampaikan tentang adanya program baru Di Desa Lubuk Saban tentang program KIS dan tidak menjelaskan kriterianya seperti apa.

Dimensi Sumber Daya terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Untuk tercapainya program KIS dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran untuk melaksanakan program KIS belum memadai. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi di lapangan yaitu kurangnya anggaran bagi penerima bantuan KIS, sehingga untuk pemberian obat-obatan kepada penerima KIS kurang baik, sehingga untuk kesembuhan pasien menjadi terhambat.

Dimensi Disposisi (sikap pelaksana) terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Adanya komitmen yang jelas dari aparat pelaksana dalam menjalankan program Kartu Indonesia Sehat. Tanggungjawab aparat pelaksana dalam melaksanakan program KIS. Untuk mengkaji dimensi sikap pelaksana pada indikator pertama yaitu adanya komitmen yang jelas dari aparat pelaksana dalam menjalankan program KIS.

Berdasarkan keterangan diatas, baik itu dari pengamatan secara langsung melalui wawancara dapat diketahui bahwasannya pelaksana KIS kepada masyarakat kurang mampu pada dimensi sikap pelaksana tidak berjalan dengan baik, dikarenakan adanya sikap pelaksana yang tidak memiliki komitmen sehingga membuat aparat pelaksana lainnya menjadi tidak punya aturan dalam menjalankan program KIS.

Struktur Birokrasi terdapat 2 (dua) indikator yaitu Pemerintah daerah membuat Standart Operasioal Procedure (SOP) program KIS. Aparat pelaksana selalu melakukan koordinasi antar warga untuk tercapainya program KIS. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa aparat pelaksana hanya sekali melakukan mengkoordinasi kepada warga pada saat pendataan nama-nama mana yang layak menjadi penerima bantuan program KIS dan menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon penerima KIS. Dari kedua indikator pada dimensi struktur birokrasi dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaan bantuan KIS, dapat dilihat dari koordinasi antara aparat pelaksana dengan masyarakat yang penjelasannya sudah cukup jelas yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Masalah kemiskinan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, isu pokok permasalahan kemiskinan semakin banyaknya jumlah angka kemiskinan di berbagai daerah Khususnya di Desa Lubuk Saban. Sehingga kebutuhan untuk kesehatan tidak lagi menjadi acuan pertama dan kebutuhan akan

papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan Masyarakat maupun pengetahuan masyarakat tentang Kartu Indonesia Sehat. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat memiliki jaminan kesehatan. Program ini pada prakteknya berjalan cukup baik, namun terkadang pelayanan nya kurang baik dan untuk obat-obatan kurang bagus yang diberikan kepada pasien penerima KIS.

Dalam melaksanakan program KIS, tentu menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan program KIS ini, berikut hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Dimensi Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggarakannya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang dimiliki oleh implementor aparat pelaksana dalam program KIS. Fasilitas yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan di puskesmas sehingga masyarakat merasa tidak nyaman. Dan minimnya sumber daya finansial (anggaran) dalam program KIS, sehingga penerima KIS diberikan obat-obatan yang kurang bagus.

Dimensi Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program KIS berjalan dengan baik oleh pemerintah. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dan sesuai SOP yang berlaku. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan program KIS. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan instansi lainya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu aspek dari struktur birokrasi ini yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan SOP.

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa SOP sudah di jalankan dengan baik untuk kelancaran program tersebut. Akan tetapi ada kesulitan saat mendata nama-nama warga tetapi ditemukan kendala karena sebagian warga tidak memiliki KTP atau KK jadi untuk memberikan bantuan KIS tersebut menjadi kendala.

SIMPULAN

Implementasi program Kartu Indonesia Sehat untuk masyarakat kurang mampu di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan program KIS dan anggaran dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat yang belum memadai serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya program KIS tersebut. Hambatan dalam pengimplementasi program Kartu Indonesia Sehat untuk masyarakat kurang mampu di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ialah terkait tidak tepatnya sasaran dalam memberikan bantuan Kartu Indonesia Sehat, dan pemberian obat-obatan di puskesmas bagi penerima KIS. Dan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program KIS untuk masyarakat kurang mampu di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu disarankan kepada aparat pelaksana Desa Lubuk Saban meningkatkan sosialisasi tentang adanya program KIS kepada masyarakat yang kurang mapu, dan disarankan kepada tim pelaksana yaitu Puskesmas agar memberikan pelayanan dan fasilitas, dan pemberian obat-obatan yang bagus kepada pasien saat mendatangi puskesmas agar warga yang dirawat bisa merasakan kesembuhan yang optimal saat diberikan obat-obatan yang bagus, dan disarankan kepada aparat pelaksana memiliki komitmen yang jelas dan bertanggungjawab saat menjalankan tugas dan wewenang masing-masing yang sesuai dengan SOP yang berlaku agar pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat brjalan secara maksimal..

DAFTAR PUSTAKA

- Br Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 145-155
- Bugin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika

- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153-161. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Mazmain dan Sabatier (2014). *Implementasi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik Bandung*: Alfabeta.
- Miles dan Huberman. (2010). *Metode Penelitian*. Alfabeta: Yogyakarta.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik Bandung*: Alfabeta.
- Munawaroh, S. & Mutiarin, D (2019). Implementasi Program “Keluar Bersama” dalam Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7 (2): 122-131
- Mutiarin, D (2015). *Implementasi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik Bandung*: Alfabeta.
- Pinem, M (2016). Pengaruh Pendidikan dan Status Sosial Ekonomi Kepala Keluarga bagi Kesehatan Lingkungan Masyarakat, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (1): 97-105.
- Purba, I.A., dan Ponirin, (2013). Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (2): 112-122.
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 126-132
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Sianturi, R., Batubara, B., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N. Sakti, F.T. & Engkus (2018). Evaluasi Program KB pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (2): 122-131.
- Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 211-217. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264>
- Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.